

Evaluasi Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Era Revolusi Industri 4.0

Alvina Sevtiani¹, Zailani Surya Marpaung²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Indonesia
(email: sevtianialvina05@gmail.com)

Abstrak

Tulisan ini bertujuan menjelaskan evaluasi kinerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Era Revolusi Industri 4.0, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong kinerja pada organisasi ini. Dalam upaya mencapai tujuan bersama dan meningkatkan eksistensi organisasi diperlukan manajemen dalam suatu organisasi. Manajemen sebagai pengendali atau pengelola dalam suatu organisasi saja tidaklah cukup, dianjurkan perlu dilakukannya evaluasi kinerja terutama pada era revolusi industri 4.0. Kinerja pada organisasi berbeda antara satu dengan lainnya. Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih terdapat kekurangan yaitu ketidakdisiplinan dalam bekerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi dan wawancara. Pemilihan informan pada penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan dimensi kuantitas dan kualitas kerja sudah cukup baik. Namun pada dimensi ketepatan waktu dalam bekerja belum optimal.

Kata kunci:

organisasi; manajemen; evaluasi; kinerja; revolusi

Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari organisasi sering kita jumpai terutama di era revolusi 4.0 saat ini. Menurut Ismail (2022), era revolusi industri 4.0 adalah era penggabungan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber. Organisasi membantu kita melaksanakan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik sebagai individu. Organisasi didirikan karena beberapa tujuan tertentu yang hanya dapat dicapai apabila dilakukan bersama-sama, apakah tujuan itu berupa pemberian pendidikan, sosial dan lain-lain. Menurut Mooney dalam Manullang (2012), organisasi adalah setiap bentuk perserikatan manusia guna mencapai tujuan bersama.

Dalam upaya mencapai tujuan bersama dan meningkatkan eksistensi organisasi diperlukan manajemen dalam suatu organisasi. Menurut Hasibuan (2022), manajemen berasal dari kata *to manage*, yang artinya mengatur. "Manajemen adalah suatu ilmu atau seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumberdaya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu" (Hasibuan, 2022:1).

Menurut Vecchio dalam Wibowo (2016:379), manajemen sebagai pengendali atau pengelola dalam suatu organisasi saja tidaklah cukup, dianjurkan perlu dilakukannya evaluasi kinerja. “...Evaluasi kinerja dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja atau prestasi kerja yang diperoleh suatu organisasi, tim, atau individu” (Wibowo, 2016:189). Evaluasi kinerja pada suatu organisasi umumnya bersifat tahunan sehingga dapat memperoleh gambaran kinerja organisasi selama satu tahun.

“Secara sederhana, kinerja dapat diartikan sebagai sebuah pencapaian hasil atau *degree of accomplishment*” (Pardede et., al 2023). Kinerja menjelaskan capaian pelaksanaan tugas oleh seluruh komponen organisasi” (Tsauri, 2014). “...Kinerja merupakan catatan yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi pekerjaan tertentu atau aktivitas-aktivitas selama periode tertentu dan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi” (Sudarmanto, 2009:25). Nazmah et al., dalam Damanik (2023) mengemukakan bahwa bagi suatu kinerja organisasi merupakan hasil dari serangkaian kegiatan kerjasama antar anggota atau unit organisasi untuk mencapai tujuan bersama organisasi.

Adapun dasar hukum yang menaungi kinerja terkait dengan pelaksanaan pemerintahan yang baik dari suatu organisasi sektor publik ialah tertuang dalam butir pertama Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menerangkan bahwa diwajibkan kepada setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya.

Menurut Soesilo dalam Nogi (2005:180), kinerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: (a) struktur organisasi, (b) kebijakan pengelolaan seperti visi misi, (c) sumber daya manusia, (d) sistem informasi manajemen berkenaan dengan pengelolaan *database* yang mempertinggi kinerja organisasi, dan (e) sarana prasarana yang berhubungan dengan penggunaan teknologi dalam aktivitas organisasi. Kasmir (2016) mengatakan bahwa kinerja dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain: (a) kemampuan dan keahlian, (b) pengetahuan, (c) rancangan kerja, (d) kepribadian, (e) Motivasi kerja, (f) kepemimpinan, (g) gaya kepemimpinan, (h) budaya organisasi, (i) kepuasan kerja, (j) lingkungan kerja, (k) loyalitas, (l) komitmen, (m) disiplin kerja.

Dasar hukum yang melatarbelakangi terbentuknya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ialah Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang menyatakan bahwa

perangkat daerah provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, organisasi ini merupakan penyelenggara di bidang kearsipan dan perpustakaan, secara teknis berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pada bidangnya, organisasi ini berupaya memberikan kinerja terbaiknya melalui sasaran startegis yang telah ditetapkan.

Berikut hasil ketercapaian kinerja sasaran strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2020 (seperti pada Tabel 1).

Tabel 1.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

Tahun	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	79	81,07
2020	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Persentase minat baca masyarakat	10	63,70
	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Persentase Kelembagaan Kearsipan yang Mengelola Arsip sesuai Standar	30	28,21
	Meningkatnya Tata Kelola arsip daerah	Persentase Persentase arsip yang terkelola	20	66,40

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2022)

Berdasarkan Tabel 1, diketahui terdapat capaian kinerja untuk sasaran strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 belum mencapai target sesuai dengan yang diharapkan, yaitu pada sasaran strategis: meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan kearsipan dengan realisasi hanya 28,21% dari target sebesar 30%.

Sebagaimana dikemukakan oleh Nanawi dalam Pardede (2023), kinerja organisasi sebagai fungsi hasil-hasil pekerjaan atau kegiatan dalam suatu organisasi dapat dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkannya selama periode waktu tertentu. Kinerja organisasi tentu melibatkan berbagai macam unsur manajemen termasuk sumber daya manusia dengan perilaku yang revelan terhadap tujuan organisasi. Sumber daya yang baik secara tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja organisasi, begitu pula sebaliknya. Contohnya apabila sumber daya manusia melakukan

tindakan yang kurang diharapkan oleh organisasi terkait kedisiplinan kerja. Hal ini dapat kita ketahui melalui tingkat kehadiran sumber daya manusia dalam bekerja. Berikut gambaran tingkat kehadiran sumber daya manusia Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 (seperti pada Tabel 2).

Tabel 2.

Tingkat Absensi Pegawai

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

Bulan	Jumlah Pegawai	Jumlah Hari Kerja	Jumlah Tidak Hadir (Orang)					Rata-rata Kehadiran Pegawai (Hari)	Hadir (%)	Tidak Hadir (%)
			C	DL	TD	DKLT	TK			
Januari										
Februari										
Maret										
April										
Mei										
Juni										
Juli	63	22	20	0	0	0	9	20	89,54	10,46
Agustus	63	18	23	12	0	0	1	15	84,57	15,43
September	62	22	20	16	0	0	4	18	79,69	20,31
Oktober	64	19	22	20	0	2	3	14	74,51	25,49
November	64	21	21	35	0	10	10	13	67,25	32,75
Desember	63	19	28	28	0	3	8	13	67,25	32,75
								15,50	77,14	22,87

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2022)

Berdasarkan Tabel 2, diketahui pada tahun 2020 masih ada sumber daya manusia atau pegawai pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang absensinya kehadirannya belum optimal atau belum sesuai harapan. Hal ini dilihat dari banyaknya data tingkat absensi “tanpa keterangan” pada bulan Juli s.d Desember, dengan rincian absensi tanpa keterangan sebagai berikut: pada bulan Juli sebanyak 9 orang, bulan Agustus sebanyak 1 orang, bulan September sebanyak 4 orang, bulan Oktober sebanyak 3 orang, serta bulan November sebanyak 10 orang, dan bulan Desember sebanyak 8 orang yang absensi kehadirannya tanpa keterangan. Rata-rata kehadiran pegawai terendah terjadi di bulan November dan Desember, masing-masing berjumlah sebanyak 13 hari kerja. Cuti terbanyak diambil oleh 28 orang pegawai pada bulan Desember. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat absensi pegawai “tanpa keterangan” dan “cuti” yang cukup tinggi diatas tentu dapat berdampak pada jam kerja yang berkurang. Dari kondisi tersebut diasumsikan bahwa pada

realisasinya meskipun di era revolusi industri 4.0 saat ini telah tersedia peralatan teknologi canggih melalui mesin absensi dengan menggunakan *fingerprint* sebagai alat elektronik untuk memonitor kehadiran pegawai, absensi sumber daya manusia di organisasi ini masih belum cukup baik. Teknologi belum dapat dimanifestasikan dengan baik apabila hanya sekelompok orang saja yang mempunyai keterlibatan didalamnya.

Evaluasi Kinerja di era revolusi industri 4.0 perlu dilakukan agar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat membuat terobosan dan strategi baru untuk memperbaiki kinerja organisasinya dalam menghadapi ancaman disrupsi global era saat ini. Berdasarkan latar belakang di atas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Era Revolusi Industri 4.0?
2. Apa faktor penghambat Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Era Revolusi Industri 4.0?

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan evaluasi kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di era revolusi industri 4.0 serta mengidentifikasi faktor penghambatnya.

Penelitian mengenai kinerja organisasi juga dilakukan oleh Pradita dengan judul Analisis Kinerja Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017, menunjukkan bahwa kinerja pegawai pada instansi ini belum optimal. Faktor penghambat kinerja Badan Kepegawaian Daerah pada Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 adalah bersumber dari faktor eksternal, yaitu masih terdapat ketidaksesuaian formasi pekerjaan dengan kompetensi individu. Kinerja organisasi juga diteliti oleh Destriasari dengan judul Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, menunjukkan bahwa kinerja pegawai di Kantor tersebut belum optimal. Faktor yang menghambat kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang antara lain: (a) masih ada tumpang tindih pekerjaan, pegawai mengerjakan pekerjaan yang bukan tupoksi dan tanggungjawabnya, (b) kualitas kerja yang dicapai kurang optimal karena masih ada ketidakdisiplinan dalam bekerja, dan (c) kurangnya ketegasan pimpinan terhadap kinerja pegawai.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan menjelaskan evaluasi kinerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Era Revolusi 4.0, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong kinerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Era

Revolusi 4.0. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti kondisi pada obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*. Langkah-langkah penelitian menghasilkan data deskriptif kualitatif dalam bentuk kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang dan perilaku yang bermaksud untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat serta hubungan antar fenomena dalam kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di era revolusi industri 4.0.

1. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dapat memberikan informasi terkait, dianggap perlu serta berkaitan utama dengan kinerja Dinas Kearsipan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada era revolusi industri 4.0. Pemilihan informan pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu dimana informan sengaja ditentukan berdasarkan pertimbangan peran dan fungsi informan sesuai fokus masalah penelitian, sehingga dapat memudahkan instrumen penelitian memahami situasi sosial yang diteliti. Bungin dalam Destriasari (2015) mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, penentuan informan yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci atau situasi sosial tertentu yang syarat dengan fokus penelitian. Berikut informan dalam penelitian ini:

- 1) *Key Informant* (informan kunci) adalah Sekertaris Dinas, Pegawai Sub Koordinator Perencanaan, Kabid Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Kabid Pelestarian Koleksi Nasional dan Pelestarian Naskah kuno, Kabid Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, Kabid Pengelolaan Arsip Daerah Provinsi.
- 2) Informan tambahan terdiri atas Pegawai Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Pegawai Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Pelestarian Naskah kuno, Pegawai Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, dan Pegawai Bidang Pengelolaan Arsip Daerah Provinsi.

2. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

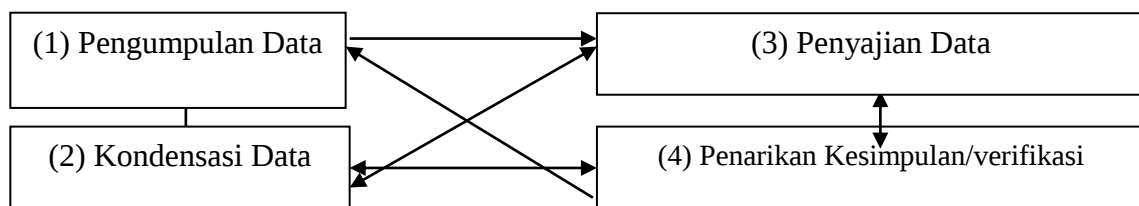
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan selama pelaksanaan maupun setelah selesai penelitian di lapangan. Analisis data pada penelitian ini menggunakan model interaktif oleh

Miles & Huberman (2014). Miles & Huberman (2014) menterjemahkan analisis data sebagai aktivitas analisis yang dilakukan secara interaktif, berlangsung terus menerus hingga tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data model interaktif pada penelitian ini dilakukan dengan kegiatan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berikut gambaran model interaktif Miles & Huberman (2014) (Gambar 1)

Gambar 1.

Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman (2014)



Sumber: Diolah Penulis, 2022

3. Teknik Keabsahan data

“...Teknik keabsahan data pada penelitian kualitatif dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan merupakan penelitian ilmiah atau tidak sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif antara lain adalah *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*” (Sugiono, 2016). Prosedur pengujian keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *credibility* atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian, agar hasil penelitian yang dilakukan tidak diragukan. Pengecekan uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi teknik dan sumber. Triangulasi teknik adalah pengecekan dengan menggunakan beragam teknik atau cara dan waktu untuk mengungkap data. Triangulasi ini dilakukan kepada sumber data dengan membandingkan data-data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara triangulasi sumber adalah pengecekan dilakukan dengan cara mencari data dari sumber-sumber yang beragam, masih terkait satu sama lain atau dengan membandingkan data-data yang diperoleh dari wawancara dengan subjek penelitian. Triangulasi sumber dilakukan dengan wawancara kepada sumber daya manusia Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dianggap sesuai dengan topik atau permasalahan, untuk pengecekan terhadap kebenaran data.

Hasil dan Pembahasan

1. Deskripsi Hasil Penelitian

Emerson dalam Putra (2022) menjelaskan bahwa manajemen terdiri atas 5 unsur, antara lain (a) manusia, (b) *money*, (c) *materials*, (d) *machines*, dan (e) *methods*.

(a) *Man* (manusia)

Man adalah unsur mutlak dan penting bagi manajemen suatu organisasi. Organisasi tidak akan berjalan tanpa adanya manusia. Manusia mengelola segala proses dalam kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi bahkan dalam memajukan organisasi. Berikut jumlah pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut jenis kelamin pada tahun 2020 (seperti pada Tabel 3).

Tabel 3.

**Jumlah Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020**

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	45
Perempuan	48
Jumlah	93

Sumber: LAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 3, diketahui Jumlah sumber daya manusia hingga tahun 2020 sebanyak 93 orang, terdiri atas 45 laki-laki dan 48 perempuan. Pradita (2017) mengemukakan bahwa kunci utama kesuksesan sebuah organisasi adalah pada manusia sebagai suber daya pelaksana semua kegiatannya. "...Manusia yang berpengetahuan, berkualitas dan berkapasitas merupakan aset penting organisasi, sehingga mampu mempertahankan posisi organisasi dalam suatu lingkungan yang kompetitif" (Pradita, 2017:1). Dari pernyataan ini dapat dirtikan bahwa peran sumber daya manusia tentu berpengaruh besar untuk kinerja suatu organisasi. Berikut sumber daya manusia Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut tingkat pendidikan pada tahun 2020 (seperti pada Tabel 4)

Berdasarkan Tabel 4, diketahui pada tahun 2020 jumlah sumber daya manusia/pegawai dengan kriteria pendidikan: tingkat pendidikan S3 sebanyak 1 orang, S2 5 orang, S1 51 orang, D3 sebanyak 12 orang, serta SLTA 23 orang, dan SD 1 orang .

Tabel 4.
Jumlah Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020

Uraian	Tingkat Pendidikan								Jumlah
	S3	S2	S1	D3	D2/D1	SLTA	SLTP	SD	
Laki-Laki	1	2	25	3	-	14	-	-	45
Perempuan	-	3	26	9	-	9	-	1	48
Jumlah	1	5	51	12	-	23	-	1	93

Sumber: LAKIP DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

Dari Tabel ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan pegawai cukup baik, akan tetapi untuk menghadapi situasi kondisi sosial, ekonomi, dan permasalahan yang terjadi di masyarakat yang sangat kompleks seperti dampak dari perkembangan industri 4.0, dalam hal mengembangkan dan mempertahankan posisi organisasi dalam suatu lingkungan yang kompetitif, organisasi tetap harus berupaya memberikan pendidikan dan pelatihan kepada sumber daya manusianya. Dengan menempuh tingkat pendidikan atau mengikuti pelatihan tertentu, sumber daya manusia dapat mempunyai pengetahuan tertentu, yaitu cakap dalam melaksanakan tugas dan mudah mengembangkan diri pada bidang kerjanya juga dapat berpotensi bekerja lebih maksimal untuk meningkatkan kinerja organisasi.

(b) Money

Money (uang) adalah unsur penggerak yang mendukung pembiayaan kegiatan suatu organisasi dalam membeli peralatan atau material yang dibutuhkan dan membiayai gaji tenaga kerja. Keuangan disebut juga dengan anggaran. Menurut Nadjib (2021:69), anggaran adalah instrumen penting bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan publik untuk tercapainya tujuan bernegara. Berikut ditampilkan pagu anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 (seperti pada Tabel 5).

Tabel 5.
Pagu Anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

Program	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Total (Rp)
Peningkatan Pelayanan Pemerintah		2.412.658.500,00	8.497.873.863,00
Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan		307.618.790,00	307.618.790,00
Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan		114.268.460,00	114.268.460,00
Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan		119.030.000,00	119.030.000,00
Peningkatan Pengelolaan dan Pelestarian Arsip		129.938.000,-	129.938.000,00
Jumlah	8.497.873.863,00	3.083.513.750,00	11.581.387.613,00

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2022)

Berdasarkan Tabel 5, diketahui bahwa pada tahun 2020 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengelola anggaran atau dana APBD dengan alokasi sebesar Rp. 11.581.387.613, terdiri atas belanja tidak langsung yaitu sebesar Rp.8.497.873.863, dan belanja langsung sebesar Rp. 3.083.513.750.

(c) Materials

Materials atau bahan baku adalah unsur utama dalam manajemen suatu organisasi untuk diolah sampai menjadi produk akhir untuk diserahkan pada konsumen. ...”Konsep layanan informasi perpustakaan dapat menjangkau seluruh elemen, sehingga mendorong peningkatan kompetensi setiap individu hingga dapat menghidupkan ekonomi kreatif masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat” (Prasetyo & Utami, 2020). Berikut jam pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (seperti pada Tabel 6).

Tabel 6.
Jadwal Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Hari	Waktu Layanan	Keterangan
1	Senin-Jumat	08.00-16.00	Buka
2	Sabtu-Minggu	Tidak ada	Tutup
3	Libur Nasional/Cuti	Tidak ada	Tutup

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2022)

(d) *Machines* (Mesin)

Machines ini maksudnya adalah peralatan, teknologi ataupun fasilitas penunjang yang berguna untuk mengelola dan membantu mempercepat proses kerja organisasi, sehingga membawa banyak kemudahan dan keuntungan maksimal dalam bekerja. Unsur *machines* disebut juga sarana prasana. Berikut sarana dan prasarana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (seperti pada Tabel 7).

Tabel 7.

Aset Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Aset yang Tersedia	Jumlah		Keterangan
1.	Ruang Administrasi	1	Ruang	Operasional Bantuan Perpustnas Bantuan ANRI
2.	Ruang Pelayanan	1	Ruang	
3.	Ruang Pengolahan Bahan Pustaka	1	Ruang	
4.	Mobil Dinas	2	Unit	
5.	Mobil Perpustakaan Keliling	2	Unit	Operasional Bantuan Perpustnas Bantuan ANRI
6.	Mobil Sadar Arsip	1	Unit	
7.	Sepeda Motor Dinas	2	Unit	
8.	V.S.W.R <i>Standing Review</i>	1	Set	
9.	Lemari Penyimpanan	2	Unit	Operasional Bantuan Perpustnas Bantuan ANRI
10.	Rak Penyimpanan	1	Set	
11.	Mesin Tik Manual	3	Unit	
12.	Mesin Tik Elektronik	1	Unit	
13.	Mesin <i>Calculator</i>	4	Buah	Operasional Bantuan Perpustnas Bantuan ANRI
14.	Mesin <i>Fotocopy</i>	2	Unit	
15.	Lemari Besi	3	Buah	
16.	Rak Buku Perpustakaan	1	Paket	
17.	<i>Filling</i> Besi/Metal	6	Buah	Operasional Bantuan Perpustnas Bantuan ANRI
18.	<i>Filling</i> Kayu	1	Unit	
19.	Lemari Kayu	2	Unit	
20.	Lemari Refrensi	1	Unit	
21.	Papan Visual	1	Unit	Operasional Bantuan Perpustnas Bantuan ANRI
22.	Genset	3	Unit	
23.	Mesin Laminating	1	Unit	
24.	Rak Kayu	4	Buah	
25.	Meja Katalog Elektronik	1	Buah	Operasional Bantuan Perpustnas Bantuan ANRI
26.	Meja Rapat	2	Buah	
27.	Meja Resepsionis	1	Unit	
28.	Kursi Rapat	60	Buah	
29.	Kursi Tamu	1	Set	Operasional Bantuan Perpustnas Bantuan ANRI
30.	Kursi Putar	1	Paket	
31.	Kursi Biaya	2	Paket	
32.	Meja Komputer	3	Paket	
33.	Meja Biro	3	Paket	Operasional Bantuan Perpustnas Bantuan ANRI
34.	Sofa	1	Set	
35.	Almari Katalog	1	Set	
36.	Almari Buku Referensi	1	Set	
37.	Almari Buku Anak-anak	1	SEt	Operasional Bantuan Perpustnas Bantuan ANRI
38.	Kursi Layanan	1	Set	
39.	Kursi Kerja	19	Paket	
40.	Meja Baca	2	Paket	
41.	Rak TV	1	Unit	Operasional Bantuan Perpustnas Bantuan ANRI
42.	Karpet	1	Set	

No.	Aset yang Tersedia	Jumlah	Keterangan
43.	<i>Vacum Cleaner</i>	4	Set
44.	Mesin Potong Rumput	1	Buah
45.	Lemari Es	2	Unit

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2022)

Berdasarkan Tabel 7, diketahui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai mempunyai 88 sarana dan prasarana sebagai aset yang tersedia.

(e) *Methods*

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Organisasi ini menyelenggarakan fungsi:

(a) Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan provinsi; (b) Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan provinsi; (c) Penyelenggaraan administrasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; (d) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dan (e) Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2. Pembahasan

Era revolusi industri 4.0 mendatangkan inovasi teknologi disruptif mengaburkan batas antara fisik, digital, dan biologis di semua sektor, serta mengubah cara manusia hidup dan bekerja. Terobosan teknologi ini memang dapat menciptakan peluang di bidang ekonomi, sosial, dan pengembangan diri, namun kecerdasan buatan ini juga akan dapat mengambil alih pekerjaan manusia. Pengaruh era revolusi industri 4.0 bagi suatu organisasi mengharuskannya untuk dapat memberikan kesempatan kepada pegawai, yaitu kesempatan untuk terus mengembangkan potensi sehingga mampu dan siap bersaing di era revolusi industri 4.0. sumber daya manusia pada era ini perlu meningkatkan kompetensi dan meningkatkan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi digital seperti *big data*, *internet of things*, *Artificial Intelligence* dan *lain-lain* untuk menjawab tuntutan perkembangan zaman. Menghadapi perubahan sekaligus tantangan era disrupsi 4.0, kesiapan pembangunan sumber daya manusia pada suatu organisasi sangat diperlukan.

...” Era revolusi 4.0 melalui teknologi informasi dan komunikasi memberi dampak perubahan pada kebutuhan pengguna, sehingga perpustakaan haruslah memaksa untuk beralih dari lingkungan manual ke otomatis sama halnya juga kepada Dinas Kearsipan dan perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung “(Syamsuddin, 2023). Organisasi ini harus

berusaha untuk terus meningkatkan kinerja organisasinya. Menurut Mathis dan Jackson (2013), kinerja adalah proses evaluasi berapa baik kinerja organisasi dapat dilaksanakan terkait pekerjaan pada suatu organisasi dibandingkan dengan satu set standar dan dapat dikomunikasikan dengan para pegawai yang bekerja pada organisasi tersebut. Beberapa dimensi yang dapat digunakan untuk menjelaskan mengenai kinerja antara lain: (a) kuantitas kerja, (b) kualitas kerja, dan (c) ketepatan waktu dalam bekerja.

a. Analisis Evaluasi Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada Era Revolusi Industri 4.0 Dilihat Dari Dimensi Kuantitas Kerja

Kuantitas kerja suatu organisasi dapat diketahui melalui jumlah aktivitas yang ditugaskan beserta hasilnya dalam kurun waktu tertentu sesuai tanggung jawab dan waktu yang telah ditentukan. Kuantitas hasil kerja dari suatu kegiatan tentunya menggunakan sumber daya dengan tepat sasaran, atau secara efektif dan efisien. Kuantitas hasil kerja dapat diupayakan dengan melaksanakan program kerja organisasi yang telah disepakati. Setelah kegiatan kerja organisasi selesai dilaksanakan, maka diperoleh gambaran jumlah (kuantitas) hasil kerjanya, apakah para pegawai dapat membantu pemberian hasil terbaik bagi kinerja organisasinya seperti yang diharapkan atau tidak.

Hasil lainnya menyatakan bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyelenggarakan berbagai program, seperti pada tahun 2020, organisasi ini telah menyelenggarakan 4 program dengan turunan sebanyak 11 kegiatan kerja. Berikut keluaran dari masing-masing program

- (1) program pengembangan bahan pustaka dan layanan perpustakaan, dilaksanakan dengan 2 kegiatan kerja yaitu pertama: kegiatan penyusunan bibliografi induk daerah dan kegiatan katalog induk daerah dengan keluaran 2 dokumen pada setiap kegiatannya, dan kedua: kegiatan koleksi hasil terbitan daerah dengan keluaran sebanyak 376 bahan pustaka yang terkelola dan terpelihara; Sedangkan layanan perpustakaan, dilaksanakan dengan 2 kegiatan kerja yaitu pertama: kegiatan pelayanan perpustakaan keliling menghasilkan keluaran yakni fasilitas layanan perpustakaan keliling bagi masyarakat, pelajar atau mahasiswa di 4 kabupaten seperti Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka dan sebagainya. Kedua: kegiatan pengembangan minat dan budaya baca pemerintah provinsi menghasilkan keluaran sebanyak 200 orang peserta lomba, terdiri dari lomba bercerita bahasa daerah, menulis puisi untuk anak SD, penulisan cerita rakyat daerah dan lainnya;
- (2) program pengembangan sumber daya perpustakaan, dilaksanakan dengan 2 kegiatan kerja diantaranya yaitu kegiatan lomba pustakawan terbaik tingkat provinsi yang menghasilkan keluaran sebanyak 13 sekolah yang mengikuti lomba pengelolaan perpustakaan sekolah

tingkat provinsi. Namun untuk kegiatan lomba pustakawan terbaik tingkat provinsi tidak dapat dilaksanakan karena telah terlaksana di APBN;

- (3) program peningkatan pembinaan dan pengawasan kearsipan, dilaksanakan dengan 2 kegiatan kerja yaitu pertama: kegiatan lomba kearsipan di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghasilkan keluaran 4 organisasi perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku, dan kedua: kegiatan pengawasan kearsipan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghasilkan keluaran 8 organisasi perangkat daerah yang mengelola arsip sesuai standar;
- (4) program peningkatan pengelolaan dan pelestarian arsip, dilaksanakan dengan 3 kegiatan kerja yaitu pertama: kegiatan pemeliharaan rutin atau berkala arsip daerah dengan keluaran 251 arsip yang terkelola, kedua: kegiatan penelurusan sejarah pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan keluaran sebanyak 150 buku terkait sejarah pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan ketiga: kegiatan pendampingan pengelolaan arsip dinamis di kabupaten/kota, namun kegiatan ini dilaksanakan oleh pihak lain/dirasionalisasi. Rasionalisasi adalah suatu upaya untuk mengubah alur kerja ad hoc/panitia/organisasi yang dibentuk dalam jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan program khusus yang membutuhkan panitia khusus.

Semua kuantitas kerja tersebut tidak lepas dari peran kepala dinas bersama setiap kepala bidang. Peran mereka yaitu memberikan surat perintah tugas kepada pegawai yang dianggap perlu atau penting untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan agar dapat meningkatkan kinerjanya. Setiap kepala bidang memberikan arahan dan masukan terkait program kerja yang telah disepakati, dan mengontrol pengeluaran sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan program.

b. Analisis Evaluasi Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada Era Revolusi Industri 4.0 Dilihat Dari Dimensi Kualitas Kerja

Kualitas merupakan mutu atau tingkat dari bagus tidaknya, dalam arti tinggi rendahnya atau baik buruknya sesuatu. Kualitas kerja adalah suatu proses menilai prestasi kerja organisasi, apakah bekerja dengan baik, tertib, benar. Kualitas kerja organisasi dapat dilihat dari capaian kinerja sasaran strategis organisasi. Capaian kinerja diperoleh pada akhir pelaksanaan kegiatan kerja. Berikut gambaran capaian sasaran strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 (seperti pada Tabel 8).

Tabel 8.
Capaian Sasaran Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

Sasaran	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan	Indeks kepuasan layanan perpustakaan	79	81,07	102,6
Meningkatnya minat baca masyarakat	Persentase minat baca masyarakat	10	63,70	636,96
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan kearsipan	Persentase kelembagaan kearsipan yang mengelola arsip sesuai standar	30	28,21	94,03
Meningkatnya tata kelola arsip daerah	Persentase arsip yang terkelola	20	66,40	332,01

Sumber: LAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 8, diketahui pada tahun 2020 telah memperoleh capaian sasaran strategis yang baik. Hal ini dapat dilihat dari setiap butir sasaran strategis yang ditargetkan dapat terealisasi dengan baik. Adapun sasaran strategis terbesar diperoleh pada sasaran strategis: minat baca masyarakat, yaitu sebesar 636,96%. Namun terdapat satu sasaran strategis yang tidak mencapai target pada realisasinya di tahun tersebut, yakni pada sasaran: meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan kearsipan. Sasaran startegis tersebut hanya mampu terealisasi 28,21% dari yang ditargetkan. Meskipun demikian, sasaran tersebut masih mampu memperoleh capaian kinerja sasaran startegis yang baik, yakni sebesar 94,03%.

Hasil lainnya menyatakan bahwa pada sasaran strategis “meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan”, target indeks kepuasan layanan perpustakaan adalah sebesar 79%, diperoleh realisasi capaian sekitar 81,07% (lebih dari target). Capaian sasaran ini juga sangat tinggi yaitu sebesar 102,6%. Hal tersebut tidak lepas dari peran kepala bidang pembinaan dan pengembangan perpustakaan yang meninstruksikan kepada pegawai bidang pembinaan dan pengembangan perpustakaan untuk membuat SKM (Survei Kepuasan Masyarakat). *Survey* tersebut dibuat sesuai dengan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil survei dikumpulkan dan dianalisa sesuai dengan butir-butir dalam rujukan dan diolah menggunakan aplikasi SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*), yaitu aplikasi yang digunakan untuk pengolahan dan menganalisis data yang memiliki kemampuan analisis statistik serta sistem manajemen data dengan lingkungan grafis. Survei ini relatif atau dilakukan minimal satu tahun sekali. Kepala Dinas juga menugaskan kepada para pegawai untuk mengikuti berbagai

sosialisasi, sehingga dapat mendukung tercapainya sasaran startegis untuk dapat terlaksana dengan baik. Dalam upaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, Kepala Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan juga menerapkan jadwal piket penjagaan perpustakaan bagi para pustakawannya, sehingga layanan perpustakaan tidak pernah kosong.

Dari pernyataan diatas, dapat diartikan bahwa sumber daya manusia pada bidang pembinaan dan pengembangan perpustakaan telah memiliki kompetensi work 4.0 sebagai kombinasi *hard skill*, *soft skill*, keahlian mengolah teknologi informasi komunikasi dan pengetahuan untuk menyongsong revolusi industri 4.0 dengan memanfaatkan dampak positif dari perkembangannya. Menurut Tahar, et al., kompetensi yang harus dimiliki sumber daya manusia *work* 4.0 diantaranya: (1) digitilisasasi lingkungan kerja berdasarkan teknologi, (2), kolaborasi dengan sistem *cyber*, (3) Proses kerja fleksibel dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna, (4) Tugas-tugas mental, dan (5) Tim kerja.

Hasil lainnya menyatakan bahwa kualitas kerja organisasi ini belum maksimal yaitu pada sasaran meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan kearsipan. Sasaran startegis ini hanya mencapai 28,21% dari target 30%. Penyebabnya ketidaktercapaian ini terjadi karena jumlah Organisasi Perangkat Daerah, SMA/SMK, maupun SLB yang dapat mengelola arsip secara baku hanya sebanyak 11 Perangkat Daerah dari total sebesar 39 Perangkat Daerah. Meskipun demikian, sasaran ini masih dapat dikatakan cukup baik karena memperoleh persentase capaian sebesar 94,03%".

Terkait kualitas kerja suatu organisasi, perkembangan era revolusi industri 4.0 tentu mengharuskan organisasi berbasis digital dan inklusi sosial. Bondar (2019) menyatakan bahwa paradigma baru pengelolaan perpustakaan adalah perpustakaan menjadi ruang interaksi terbuka melalui strategi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

..."perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah perpustakaan yang memberikan fasilitas kepada masyarakat mengembangkan potensi dengan keragaman budaya, keinginan untuk menerima perubahan, hingga menawarkan kesempatan berusaha melindungi dan memperjuangkan hak asasi manusia" (Tebai, 2022).

Bondar (2019), kebijakan dan startegi bidang perpustakaan fokus pada tranformasi berbasis inklusi dengan melakukan: a) pembangunan, peningkatan konektivitas infrastruktur perpustakaan, b) peningkatan sumber bacaan terapan/praksis, dan c) peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan sebagai pendamping literasi bagi masyarakat. Sehingga, melalui budaya literasi indikator pembangunan makro dapat diselaraskan melalui rencana pembangunan nasional, provinsi, kabupaten.kota, dan desa serta dapat mewujudkan gerakan budaya nasional

dan memperkuat ekosistem literasi dengan konsep perpustakaan berbasis inklusi sosial sosial tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun perpustakaan berbasis inklusi sosial diantaranya: a) tersedianya kegiatan pemberdayaan masyarakat, b) hak memperoleh layanan perpustakaan, dan c) adanya akses transformasi perpustakaan. ...”Faktor SDM seperti kinerja, sikap profesional, memberi respon yang baik, ikut menentukan dalam memberikan pengaruh agar pelayanan perpustakaan kepada pemsutaka berkualitas” (Karim & Tigubu, 2022).

Seperti dalam hal meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan, hasil lainnya menyatakan bahwa organisasi ini melaunchingkan sebuah aplikasi perpustakaan digital yang diberi nama e-Pusda Provinsi Babel dan iPusda Babel sebagai media teknologi terkini mereka untuk *searching* bahan pustaka digitalnya secara *real time*.

Dalam rangka meningkatnya tata kelola arsip daerah, organisasi ini memanfaatkan aplikasi Srikandi untuk menciptakan kelancaran persyaratan kearsipan secara elektronik sehingga dapat efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Srikandi dapat memenuhi kebutuhan pembuatan surat menyurat dan arsip elektronik secara online, terintegrasi dan terekam oleh pusat data nasional. Dengan adanya aplikasi-aplikasi ini publik dapat mengakses layanan kapanpun dan dimanapun tanpa terkendala ruang dan waktu bahkan distribusi. Fasilitas digital ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat lokal namun juga masyarakat dunia maya pada umumnya.

c. Analisis Evaluasi Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada Era Revolusi Industri 4.0 Dilihat Dari Dimensi Ketepatan Waktu Dalam Bekerja

Penggunaan atau ketepatan waktu dalam bekerja merupakan tingkat kehadiran atau keterlambatan, ataupun waktu kerja yang efektif. Kedisiplinan adalah kesadaran dan ketersediaan seseorang mentaati segala peraturan dan tugas yang menjadi tanggungjawabnya dalam suatu organisasi. “...Disiplin merupakan kegiatan manajemen untuk menjalankan standar organisasional” (Handoko, 2018:208). Menurut Handoko (2018), terdapat 2 tipe kegiatan kedisiplinan yaitu disiplin preventif dan disiplin korektif. Disiplin preventif adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendorong para staf atau pegawai mengikuti berbagai standar dan aturan yang ada sehingga dapat mencegah penyelewengan. Sedangkan disiplin korektif adalah kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada dan mencoba untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut.

Hasil lainnya menyatakan bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memuat absensi pegawai secara manual yaitu dengan tanda

tangan. Tujuannya agar para pegawai lebih berkomitmen dan bertanggungjawab terhadap penggunaan waktu kerjanya, serta diharapkan dapat membuat rekapan absensi menjadi lebih lengkap selain menggunakan *fingerprint*. Namun, kontras dengan pernyataan ini, berikut ditampilkan gambaran absensi sumber daya aparatur organisasi ini pada tahun 2021 (seperti pada Tabel 9).

Berdasarkan Tabel 9, diketahui pada tahun 2021 masih ada sumber daya manusia atau sumber daya aparatur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang absensinya kehadirannya belum optimal dan masih belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut dilihat dari masih adanya aparatur dengan absensi kerja “tanpa keterangan” pada bulan Desember, yaitu sebanyak 17 orang. Rata-rata kehadiran pegawai tertinggi terjadi pada bulan Desember, yaitu sebanyak 22 hari total jumlah hari kerja, sedangkan rata-rata jumlah waktu kehadiran aparatur terendah terjadi pada bulan Mei, yaitu 16 hari kerja. Bulan Desember merupakan bulan dinas luar tertinggi yang diikuti oleh aparatur pada dinas ini pada tahun 2021 (17 orang), dan bulan Juni merupakan bulan cuti tertinggi aparatur pada tahun 2021, dengan jumlah sebanyak 20 orang. Presentase kehadiran terendah terjadi pada bulan Maret yaitu sebesar 85,16%.

Tabel 9.
Tingkat Absensi Sumber Daya Aparatur
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2021

Bulan	Jumlah Pegawai	Jumlah Hari Kerja	Jumlah Tidak Hadir (Orang)					Rata-rata Kehadiran Pegawai (Hari)	Hadir (%)	Tidak Hadir (%)
			C	DL	TD	DKLT	TK			
Januari	60	20	7	1	0	0	0	19	96,58	3,42
Februari	60	19	16	0	0	3	1	17	90,96	9,04
Maret	64	22	19	0	0	8	0	19	85,16	14,84
April	63	21	18	3	0	4	0	19	91,31	8,69
Mei	66	17	9	5	0	0	0	16	94,56	5,44
Juni	67	21	20	2	0	0	0	19	89,69	10,31
Juli	66	21	10	1	0	0	0	20	94,59	5,41
Agustus	66	20	2	5	0	0	0	19	96,89	3,11
September	67	22	15	4	0	0	0	21	93,28	6,72
Oktober	67	20	11	8	0	2	1	19	95,37	4,63

Bulan	Jumlah Pegawai	Jumlah Hari Kerja	Jumlah Tidak Hadir (Orang)					Rata-rata Kehadiran Pegawai (Hari)	Hadir (%)	Tidak Hadir (%)
			C	DL	TD	DKLT	TK			
November	67	22	14	17	0	3	0	20	91,11	8,89
Desember	67	23	16	1	0	0	17	22	95,26	4,74
								19,17	92,90	7,10

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2022)

Selain itu, diketahui masih terdapat ketidakdisiplinan kerja oleh para staf pada tahun 2022 (seperti pada Tabel 10). Berdasarkan Tabel 10, diketahui hingga tahun 2022 ketidakdisiplinan pada jam kerja masih terjadi. Hal ini dilihat dari banyaknya data tingkat absensi “tanpa keterangan” pada bulan Januari s.d Desember, dengan rincian absensi tanpa keterangan sebagai berikut: pada bulan Januari sebanyak 7 orang, bulan Februari sebanyak 1 orang, bulan Maret 6 orang, bulan April dan Juni 9 orang, bulan Juli 25 orang, bulan Agustus 7 orang, bulan September 11 orang, bulan Oktober 6 orang, serta bulan November 5 orang, dan bulan Desember 33 orang yang absensi kehadirannya tanpa keterangan. Ketidakhadiran pada tahun ini disebabkan oleh banyaknya pegawai yang mengambil cuti, dinas luar dan diklat.

Tabel 10.

Tingkat Absensi Sumber Daya Aparatur

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2022

Bulan	Jumlah Pegawai	Jumlah Hari Kerja	Jumlah Tidak Hadir (Orang)					Rata-rata Kehadiran Pegawai (Hari)	Hadir (%)	Tidak Hadir (%)
			C	DL	TD	DKLT	TK			
Januari	65	21	20	0	0	0	7	38	58,46	41,54
Februari	65	18	26	5	0	2	1	57	87,69	52,31
Maret	65	22	20	8	0	5	6	26	40,00	60,00
April	64	19	12	5	0	13	9	25	39,06	60,94
Mei	64	15	17	7	0	0	0	40	62,50	37,50
Juni	65	21	18	24	0	3	9	11	16,92	83,08
Juli	65	21	21	7	0	3	25	55	84,62	86,15
Agustus	65	22	27	23	0	0	8	7	10,77	89,23
September	65	22	21	25	0	0	8	11	16,92	83,08
Oktober	65	21	18	31	0	0	10	6	9,23	90,77

Bulan	Jumlah Pegawai	Jumlah Hari Kerja	Jumlah Tidak Hadir (Orang)					Rata-rata Kehadiran Pegawai (Hari)	Hadir (%)	Tidak Hadir (%)
			C	DL	TD	DKLT	TK			
November	64	22	18	31	0	0	10	5	7,81	92,19
Desember	64	22	12	16	0	3	0	33	51,56	48,44
									40,46	68,64

Sumber: Dnas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2022)

Hasil lainnya menyatakan bahwa pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Dinas telah menerapkan kegiatan kedisiplinan preventif untuk mencegah ketidakdisiplinan yaitu dengan cara memberikan arahan dan dorongan kepada para pegawai untuk mengikuti standar operasional prosedur dan peraturan yang berlaku pada organisasinya. Pimpinan menerapkan penggunaan mesin absensi sidik jari /*absensi by system* sesuai perkembangan teknologi revolusi industri 4.0 untuk menghindari manipulasi data dan menghemat waktu dalam melakukan absensi. Bahkan terdapat absen secara manual dengan tanda tangan sehingga dapat diketahui dan diberikan sanksi apabila ada pegawai yang melanggar aturan jam kerja. Absensi Apel Harian Pegawai.

Sedangkan terkait kedisiplinan korektif, Kepala Dinas maupun beberapa kepala bidang kerap memberikan teguran dan pemanggilan kepada para pegawainya yang terindikasi tidak disiplin, dan menerapkan umpan balik dengan memberikan surat peringatan kepada pegawai yang tidak disiplin. Mencegah ketidakdisiplinan tidak cukup hanya menunggu arahan dan dorongan dari pimpinan saja. Ketidakdisiplinan hanya dapat dihindari apabila pegawai mengikuti aturan/prosedur yang berlaku.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan bahwa kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di era revolusi industri 4.0 sudah cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Dimensi ketepatan waktu dalam bekerja terkait kedisiplinan belum cukup baik. Hasil rekapitulasi presensi pegawai pada tahun 2020 s.d 2022 menunjukkan bahwa masih ada pegawai yang tidak disiplin. Presentase ketidakhadiran sebesar 22,87% hingga masih 7,10%.

Faktor pendorong kinerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di era revolusi industri 4.0 adalah sistem informasi manajemen, sarana

prasarana, kemampuan dan keahlian, serta kepemimpinan, secara langsung maupun tidak langsung mendukung dan memudahkan organisasi ini mencapai sasarannya. Sedangkan faktor penghambatnya adalah disiplin kerja. Berikut rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kinerja organisasi tersebut: a) Kepala daerah juga tetap memajukan kualitas kearsipan maupun perpustakaan daerahnya, b) pimpinan bersama setiap kepala bidang memonitoring secara berjenjang dan *continue* setiap hasil maupun perilaku pegawai agar tetap relevan dengan tujuan organisasi, misalnya dengan memonitoring daftar rekapitulasi presensi pegawai, sehingga dapat diberikan sanksi apabila ada pegawai yang melanggar aturan jam kerja, c) Setiap kepala bidang harus menerapkan *behaviorial technique* dengan menggunakan *brainstorming* atau pendekatan partisipatif terhadap penemuan fakta atau identifikasi terkait ketidakdisiplinan, misalnya dengan duduk bersama mendiskusikan kendala yang melatarbelakangi ketidakdisiplinan dan individu yang harus berkomitmen tidak melakukan pelanggaran kembali. Pimpinan perlu merekrut pegawai yang *growth mindset*, yaitu terbuka terhadap informasi, merangkul tantangan dan melihat peluang baru dalam setiap perubahan. Pegawai harus melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi tim yang baik dengan meminta arahan kepada rekan kerja yang memiliki kemampuan, keterampilan dan kreativitas memadai sesuai bidang penugasan dan tuntutan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kinerja. Pegawai harus meningkatkan kemampuan literasi data dan memanfaatkan informasi big data digital seperti *internet of things*, *networking* antar bidang guna mempercepat integrasi data. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Bondar, Adin. (2019). Analisis Pembangunan bidang perpustakaan terhadap peningkatan kualitas manusia dan penurunan kemiskinan. Universitas Indonesia Library The Crystal of Knowledge. *Media Pustakawan*, 26 (2), <https://doi.org/10.37014/medpus.v26i2.178>
- Damanik, Maharani Iviola Adithia., Indra, Muda., Lubis, Yurial Arief. (2024). Analisis Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana di Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan JIAPP*, 20(1), <https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/jiapp/article/view/1169>
- Destiasari, S. (2015). *Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang*. [Skripsi Ilmu Administrasi Negara. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa]. <http://eprints.untirta.ac.id/592/>.

- Hasibuan, Malayu SP. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ismail, M., Sahabuddin. (2022). Faktor Mempengaruhi Keputusan Pembelian pada Online Marketplace pada Mahasiswa Universitas Hasanuddin. *SEIKO: Jurnal of Management & Business*, 5(1), <https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i1.1831> .
- Karim, M.S., & Tigubu, J. (2022). Penerapan Pencatatan Akuntansi Keuangan Pada UKM Lokal Kota Tidore Kepulauan Berdasarkan Akuntansu Entitas. *Jurnal Mirai Manahement*, 7(2), <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/view/2046/0>
- Kasmir. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Mathis & Jackson. (2013). *Pengelolaan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Miles, M.B, Huberman, A. M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, (edition) 3. USA: Sage Publications. (Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Manullang. (2012). *Dasar-Dasar Manajemen Bagi Pimpinan Perusahaan*. Jakarta: Gajah Mada Press.
- Nadjib, Abdul. (2021). *Manajemen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan*. Yogyakarta: Idea Press.
- Tebai, Neli, D. (2022). Kualitas Pelayanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Waropen di Era Revolusi 4.0. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 4(3), <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/2361>
- Syamsuddin, Indah. (2022). Analisis Kinerja Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Barat Tahun 2018-2020. *YUME Journal of Management*, 5(2), <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/1557>
- Pardede, Putri Hertin Andika., Trimurni, Februati. (2023). Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Medan. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/10521/5815> .
- Pemerintah Indonesia. (1999). *Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. Jakarta.
- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2021). *Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021, Nomor 13 Seri D. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: Pangkalpinang.

- Praditya, A. R. (2017). *Analisis Kinerja Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017* [Thesis, Magister Manajemen, Stie Widya Wiwaha, Yogyakarta]. <http://eprint.stieww.ac.id/793/>.
- Prasetyo, W.D., Utami, D. (2020). Penguatan Perpustakaan Untuk Pembangunan: sebuah konsep transformasi berbasis inklusi sosial. *Jurnal IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia)*, 5 (2), <https://doi.org/10.1234/jurnal%20ipi.v5i2.45>
- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2020). *Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Lembaran daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020, Nomor 1 Seri D. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Republik Indonesia.(2007). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Hessel, Nogi. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sudarmanto. (2009). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tahar, Achmad., Setiadi, Pompong. B., Rahayu, Sri. (2022). Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0. *Jurnal Pendidikan Tambusai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan*, 6 (2), <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4428> .
- Tsauri, S. (2014). *Manajemen Kinerja (Performance Management)*. Jember: STAIN Jember Press.
- Wahyuningtyas, Yunita Fitri., Valena. (2023). Implementasi Budaya Kerja, Motivasi dan Kinerja Karyawan di Era Revolusi Industri 4.0 pada Ottopay Yogyakarta. *JRABI Journal Riset Akutansi dan Bisnis Indonesia Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 3 (1), <https://jurnal.stieww.ac.id/index.php/jrabi/article/view/555> .
- Wibowo. (2016). *Manajemen Kinerja*, Edisi kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.